



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

*Effective From Volume 5, No. 2, 2020*

## KOMPETENSI SEBAGAI PEMODERASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENERAPAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA

Lilis Setyowati

Dian Nuswantoro University, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

[adelissetyowati@gmail.com](mailto:adelissetyowati@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (AKPD) Kota Semarang dengan kompetensi sumber daya manusia (KSDM) sebagai pemoderasi. Metode penentuan sampel yaitu pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) yang berjumlah 59 responden yang bekerja di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang bagian keuangan dan akuntansi. Sumber data primer diperoleh dari pernyataan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi regresi linear. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara signifikan AKPD Kota Semarang dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi serta KSDM terbukti sebagai pemoderasi.

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah daerah (AKPD) Kota Semarang dengan kompetensi sumber daya manusia (KSDM) sebagai pemoderasi. Metode penentuan sampel yaitu pertimbangan tertentu (*purposive sampling*) yang berjumlah 59 responden yang bekerja di Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang bagian keuangan dan akuntansi. Sumber data primer diperoleh dari pernyataan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji regresi regresi linear. Hasil penelitian menyatakan bahwa secara signifikan AKPD Kota Semarang dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi serta KSDM terbukti sebagai pemoderasi.

Volume 5  
 Nomor 2  
 Halaman 1-10  
 Makassar, Desember 2020  
 p-ISSN 2528-3073  
 e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
 08 Oktober 2020  
 Tanggal Revisi  
 09 Oktober 2020  
 Tanggal diterima  
 23 Januari 2021

Similarity Found : 10%  
 Statistics: 344 Words  
 Plagiarized / 3341 Total Words

Kata Kunci :  
 Akuntansi, Pengelolaan Keuangan,  
 Akuntabilitas dan Kompetensi

Keywords :  
 Accounting, Financial  
 Management, Accountability, And  
 Competency



## PENDAHULUAN

Semakin berperannya pemerintah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, maka otomatis pemerintah dituntut untuk lebih berkualitas dalam penyelenggaraannya sehingga akan menciptakan akuntabilitas kinerjanya. Dalam proses peningkatan akuntabilitas diperlukan pertanggungjawaban dalam membina sumber daya dan laporan yang disusun secara berkala. Tujuan utama dilakukannya reformasi pemerintah di Indonesia yaitu mewujudkannya akuntabilitas publik. Lembaga pada organisasi pemerintahan dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas publiknya guna mempertanggungjawabkannya tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada para stakeholder. Tuntutan yang muncul yaitu perlunya dibuatkannya sebuah laporan pertanggungjawaban yang disusun dalam bentuk laporan keuangan yang dapat menggambarkan kinerja lembaga pemerintahan.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan impian semua masyarakat. Dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja diharapkan dapat menciptakan suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diterima yang sesuai dengan prinsip demokrasi yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sesuai dengan karakteristik pemerintah yang baik (*good governance*) bahwa akuntabilitas publik mencakup: (a) partisipasi (b) peran hukum, (c) transparansi, (d) *responsive*, (e) orientasi konsesus, (f) ekuitas, (g) efektivitas dan efisiensi, dan (h) visi misi (Mardiasmo 2002). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjelaskan mengenai pemberian kewenangan yang luas dalam hal mengatur sumber dana, menentukan arah, tujuan, dan target penggunaan kepada pemerintah daerah. Untuk mempertanggungjawabkan atas kegiatan pelaksanaan dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), maka gubernur/walikota/bupati selaku kepala daerah dan pimpinan unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pihak yang menggunakan anggaran diwajibkan untuk melakukan proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan yang berkaitan dengan harta (*aktiva*), kewajiban (*Liability*), dan modal (*equity*) yang berada di bawah tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan kepada pimpinan organisasi pemerintah agar menyusun laporan keuangan sebagai salah bentuk pertanggungjawaban. Selanjutnya, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penyajian dan pelaporan *financial reporting*, pemerintah menggunakan SAP sebagai pedoman. Penerapan SAP dalam menyusun laporan keuangan meningkatkan kualitas laporan keuangannya sehingga mampu menciptakan akuntabilitas kinerjanya. Putra (2016) mengemukakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan pada instansi pemerintah dapat berjalan dengan baik, jika terdapat mekanisme pengelolaan dan pelaporan *financial reporting* yang handal. Pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntabel terikat erat dengan peran sumber daya manusia (pegawai) yang menguasai bidangnya.

Untuk pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, maka pemerintah dituntut untuk mahir dalam hal mengelola keuangannya, tidak terkecuali pada Organisasi perangkat Daerah. Namun dalam situasi tertentu akan menjadi salah satu hambatan teknis dalam hal pengelolaan keuangannya, yaitu mengani akuntansinya (Putra, 2016). Hal tersebut memberi sinyal (*signal*) mengenai kebutuhan pengelola keuangan daerah pada setiap Organisasi Pemerintah Daerah perlu dilakukan secara cermat guna dapat menyelesaikan masalah akuntansi dalam dapat menyajikan informasi keuangan yang akuntabel. Darwanis (2013) menemukan bahwa terdapatnya kendala dalam proses keuangannya disebabkan karena masih terdapatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten dibidangnya di beberapa instansi pemerintah. Beberapa aparatur pemerintah kurang memahami mengenai pentingnya penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini

dikhawatirkan akan dapat menyebabkan sulitnya pencapaian akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah (AKPD) Kota Semarang dengan pendidikan pegawai sebagai pemoderasi.

## LANDASAN TEORI

### Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan penjelasan terkait manajemen keuangan daerah yaitu pengelolaan keuangan yang bertumpu / berfokus pada kepentingan publik. Gambaran tersebut merupakan refleksi atas jumlah nominal dari alokasi anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan publik, jumlah partisipasi masyarakat yang tergabung dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, pengelolaan daerah seyogyanya memiliki sifat transparan dan akuntabilitas yang berakurasi tinggi dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Definisi pengelolaan keuangan menurut BPK yaitu serangkaian aktivitas yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban bagi Pejabat Pengelola Keuangan Negara (PPKN) yang disesuaikan dengan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing - masing.

### Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.476/KMK.01/1991 akuntansi didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan, pencatatan, penganalisaan, peringkasan, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu kesatuan ekonomi untuk menyediakan informasi keuangan (*financial information*) bagi para pengguna laporan keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip akuntansi yang diadopsi ke dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (Bastian, 2005). Dengan demikian, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prasyarat yang memiliki kekuatan hukum dalam memperbaiki mutu laporan keuangan pemerintah (*government financial reports*).

Tujuan umum dari laporan keuangan pemerintah yaitu mampu dalam hal prediktif dan prospektif mengenai besarnya sumber daya yang diperlukan dan sumber daya yang diperoleh dari operasi yang berkelanjutan (*sustainable*) serta risiko yang melekat di dalamnya. Beberapa pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain: (1) masyarakat, (2) para wakil rakyat, lembaga pemeriksa dan lembaga pengawasa, (3) pihak yang berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan (4) pemerintah

### Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

KSDM meliputi kemampuan seseorang untuk melaksanakan fungsi-fungsinya dalam mencapai *goal* (tujuan) organisasi/instansi. Untuk menghasilkan luaran yang sesuai dengan tujuan organisasi dibutuhkan SDM yang kompeten di bidangnya untuk mencapai kinerja yang maksimal. KSDM diukur berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai. Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan oleh manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Latar belakang pendidikan (*education*) yang sesuai kompetensi menunjukkan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai.

### Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas dalam Standar Akuntansi Pemerintah didefinisikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan implementasi atas kebijakan (*Policy*) yang diberikan kepada institusi / entitas, telah ditetapkan secara periodik. Pada dasarnya proses akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan adalah syarat penting dalam terwujudnya akuntabilitas kinerja yang berupa keterbukaan terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2005). Bastian (2010) mendefinisikan akuntabilitas (*accountability*) berarti pertanggungjawaban / keadaan untuk dipertanggungjawabkan / keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) menjelaskan bahwa Akuntabilitas kinerja merupakan memepertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan penerapan misi oleh organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

Putra (2016) menyebutkan bahwa manajemen keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas memberikan pengaruh yang signifikan kepada kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengimplementasian akuntabilitas pada ruang lingkup institusi pemerintah, maka prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Ikrar pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan pengelolaan misi institusi yang akuntabel,
2. Dibutuhkan mekanisme dalam menjamin manajemen sumber-sumber daya secara konstan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
3. Perlu ditetapkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
4. Fokus kepada target visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, dan
5. Dibutuhkan sikap jujur, obyektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator untuk melakukan perubahan manajemen dalam instansi pemerintah melalui penambahan metode pengukuran kinerja dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

### **Pengembangan Hipotesis**

Adanya manajemen keuangan yang memadai maka akan memberikan dampak bagi para pegawai yang semakin termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya. Tujuan organisasi akan tercapai dengan baik jika organisasi tersebut melakukan manajemen keuangan yang baik pula, karena semua komponen yang ada pada organisasi menjalankan program-program kegiatannya secara bersama-sama dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, sehingga akan memberikan dampak terhadap meningkatnya (AKP) daerah. Hal serupa yang dilakukan oleh Ratna dan Nasrah (2016) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKPD). Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKPD)

Pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan berpedoman pada SAP. Laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah akan menjadi lebih baik dengan menerapkan SAP. Penerapan akuntansi pemerintah ini akan dapat mengakibatkan lebih baiknya laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian maka akan memberikan dampak yang positif terhadap AKPD yang semakin meningkat. Berpedoman pada SAP dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan menjadikan LKPD lebih akuntabel dan kinerja pemerintah pemerintah yang semakin meningkat. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armel (2017) dan Pamungkas (2012) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas LKPD. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis:

H2: Penerapan akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKPD)

Kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dapat dilihat dari pengetahuan dan kemampuan keterampilan yang dimiliki. Untuk meningkatkan AKPD, maka perlu memperhatikan setiap pegawainya harus memiliki pemahaman mengenai pekerjaannya, keahlian yang memadai. Dilakukannya pengelolaan keuangan yang baik dan diterapkannya proses akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan tanpa memiliki sumber daya yang kompeten di bidangnya tidaklah lengkap. Pegawai yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara tepat. Desiana (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya merupakan dasar seorang menyelesaikan pekerjaannya untuk mencapai kinerja yang tinggi.

H3: Kompetensi sumber daya manusia (KSDM) dapat memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (AKPD)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yaitu penelitian yang melihat hubungan beberapa variabel yang belum pasti (Sekaran, 2016). Objek penelitian ini yaitu pemerintah Kota Semarang yang dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah. Populasi penelitian adalah PNS yang bekerja pada bagian akuntansi dan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah (OPD) Kota Semarang, dan teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel diperoleh sebanyak 59 responden dari 18 unit OPD di Kota Semarang. Metode pengumpulan data menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung kepada responden dengan harapan agar kuesioner dapat kembali mendekati 100%. Setiap responden yang memenuhi kualifikasi akan dijadikan sampel dalam penelitian.

Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas serta uji asumsi klasik. Data dikelolah dengan bantuan *software* SPSS. Model analisis regresi berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3Z + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Kinerja
- a : Konstanta
- b : Koefisien Regresi
- X1 : Pengelolaan Keuangan
- X2 : Penerapan Akuntansi
- Z : Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)
- e : Error

Variabel KSDM dikatakan moderasi jika signifikan dengan koefisien regresi variabel dependen kurang dari 5%.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Uji Reliabilitas dan Validitas

Hasil uji validitas seluruh indikator masing-masing variabel dinyatakan valid. Uji reliabilitas juga menyatakan bahwa bahwa instrument dalam penelitian ini reliabel.

#### Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik menyatakan bahwa data penelitian telah memenuhi semua syarat asumsi klasik, yaitu data berdistribusi normal, bebas multikolinearitas, dan tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji t

Hasil uji t dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 1. Hasil Uji t**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	3.072	.003
	3.941	.000
Pengelolaan	2.471	.017
Penerapan	2.972	.004
Moderat X1	2.900	.005
Moderat X2		

Sumber: Data Diolah (2020)

Hasil uji pengaruh pengelolaan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Hal ini membuktikan bahwa hipotesa yang menyatakan variabel pengelolaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang diterima. Selanjutnya, Hasil uji pengaruh variabel penerapan akuntansi terhadap akuntabilitas menunjukkan nilai signifikansi  $0,017 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel penerapan akuntansi berpengaruh dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Hal ini membuktikan bahwa variabel penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang diterima.

### Uji F

Hasil uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji F**

Model	F	Sig.
1 Regression	7,690	.000
Residual		
Total		

Sumber: Data Diolah (2020)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai F hitung  $7.690 > F$  tabel  $2,76$  dan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hasil ini menunjukkan uji model penelitian diterima, sehingga dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap AKPD Kota Semarang.

### Uji Moderat

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi moderat pengelolaan keuangan  $0,004 < 0,05$  dan penerapan akuntansi  $0,005 < 0,05$ . Hal ini membuktikan bahwa variabel KSDM terbukti sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat ataupun mepeperlemah pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang. Dengan demikian maka hipotesa yang menyatakan bahwa KSDM dapat memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang diterima. Hasil uji residual ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Residual

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Sig
	B	Std. Error	
1 (Constant)	12.954	4.217	.003
Pengelolaan	.404	.103	.000
Penerapan	.275	.111	.017
Moderat X1	.130	.44	.004
Moderat X2	.132	.045	.005

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: Data Diolah (2020)

**Koefisien Determinasi**

Hasil koefisien determinasi ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

<b>Model Summary</b>			
Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.648	.420	.366

Sumber: Data Diolah (2020)

Pada tabel di atas, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,366 yang berarti bahwa korelasi hubungan antara variabel pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi dengan variabel akuntabilitas kinerja menunjukkan memberikan pengaruh terhadap AKPD Kota Semarang sebesar 36,6% sedangkan sisanya sebesar 63,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

**PEMBAHASAN****Pengaruh Pengelolaan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD)**

Untuk meyakinkan bahwa adanya pengaruh pengelolaan keuangan terhadap AKPD Kota Semarang dibuktikan dengan nilai sig  $0,000 < 0,05$ . Artinya dengan melakukan pengelolaan keuangan yang baik dalam penyusunan LKPD mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga AKPD Kota Semarang dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan mendapat tanggapan dari responden dengan kategori baik. Hal tersebut dapat dilihat melalui indikator peran dalam penyusunan program guna mencapai target kinerja mendapat tanggapan yang paling tinggi, selanjutnya indikator analisa perbedaan perencanaan dan realisasinya juga mendapat tanggapan yang sangat baik. Selain itu indikator pelaporan realisasinya pendapatan dan belanja serta penentuan jumlah alokasi sumber daya ekonomi setiap program juga mendapat tanggapan dari responden dengan kategori baik.

Nilai koefisien korelasi yang didapatkan dari pengelolaan keuangan dengan AKPD Kota Semarang menunjukkan hubungan dengan arah positif yang berarti bahwa semakin baiknya pengelolaan keuangan akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya AKPD Kota Semarang. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Ratna (2016) yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau.

**Pengaruh Penerapan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD)**

Untuk meyakinkan bahwa adanya pengaruh penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang dibuktikan dengan nilai sig  $0,017 < 0,05$ . Artinya dengan menerapkan akuntansi yang sesuai dengan SAP dalam penyusunan LKPD mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga AKPD Kota Semarang dapat meningkat. Penelitian di lapangan membuktikan bahwa indikator laporan keuangan yang disajikan untuk menyediakan informasi yang andal dan relevan memperoleh tanggapan yang paling tinggi dari responden. Serta indikator yang menyatakan bahwa laporan keuangan dapat membantu *stakeholder* dalam memeriksa pelaksanaan kegiatan dan sistem akuntansi yang berbasis akrual mendapat predikat sangat baik. Selain itu laporan keuangan yang disajikan sudah bebas dari salah saji dan laporan yang disusun dengan asumsi keberlanjutan juga mendapat tanggapan yang sangat baik dari responden.

Nilai koefisien korelasi yang diperoleh antara penerapan akuntansi dengan AKPD Kota Semarang menunjukkan hubungan dengan arah yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan akuntansi akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya AKPD Kota Semarang. Hasil penelitian ini mendukung pada penelitian Pamungkas (2012), Pratiwi (2015) dan Armel (2017) yang mengemukakan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Peranan akuntansi keuangan sektor publik memberikan sumbangan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini mendukung penelitian Zulharman (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Kota Pekanbaru.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia KSDM Memoderasi Pengaruh Pengelolaan Keuangan dan Penerapan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKPD)**

Untuk meyakinkan bahwa KSDM dapat memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang dibuktikan dengan nilai signifikan moderat pengelolaan keuangan  $0,004 < 0,05$  dan nilai signifikan moderat penerapan akuntansi  $0,005 < 0,05$ . Artinya dengan adanya KSDM yang sesuai dengan bidang pekerjaan dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi dibidangnya dapat memoderasi pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang.

### **KESIMPULAN**

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Hasil uji parsial, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang, dan variabel penerapan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap AKPD Kota Semarang. Selanjutnya, hasil pengujian moderating, menunjukkan bahwa dengan adanya KSDM terbukti sebagai variabel moderating yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi terhadap AKPD Kota Semarang.

Masih rendahnya nilai korelasi AKPD Kota Semarang yang dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan dan penerapan akuntansi, maka peneliti menyarankan dapat menambahkan beberapa variabel independen yang diduga mempengaruhi akuntabilitas kinerja serta objek penelitian yang tidak hanya bagian keuangan saja. Terbuktinya dengan KSDM yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan bidang tugasnya sebagai variabel moderating, maka pemerintah sebaiknya meningkatkan kompetensi pegawai dibidangnya dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan sehingga akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi. Saran bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian pada objek penelitian yang berbeda dengan menggunakan

tambahan variabel moderasi. Keterbatasan penelitian dialami adalah keterbatasan waktu dan pendanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Bastian, Indra. 2005. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Ed ke-3. Erlangga. Jakarta  
 Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset  
 Sekaran, Umar. 2013. *Research Method For Business 6th ed*. United States: Willey

### Artikel Online

- Abdullah, M. Wahyuddin. 2017. Pemoderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Bone. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*. Vol. III No. 2
- Armel, Raja Yoga Gustika. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon*. Vol.4 Nomor.1
- Pamungkas, Bambang. 2012. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Ranggagading* Vol.12 no.2: 82-93
- Putra Nopriansyah, Erlina, Tapi Anda Sari. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Trasnaparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Pengawasan Sebagai Variabel Moderating Pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi*, Vo.19 No.4
- Ratna, Ikhwani dan Hidayati Nasrah. 2016. Pengaruh Pengelolaan Keuangan daerah Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. *Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* Vol. 19 No. 1
- Riantiaro Reynaldi, Nur Azlina. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Pekbis Jurnal* Vol.3 No.3:Hal. 560-568
- Wardhana, Gede Ary Surya, Ni Ketut Rasmini, dan Ida Bagus Putra Astika. 2015. Pengaruh Kompetensi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4 No.9. Universitas Udayana
- Zulharman, Khodri. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jom FEKON*. Volume 2 Nomor 2

### Dokumen lain

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta
- Keputusan Menteri Keuanann Nomor 476/KMK.01 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah. 1991. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003 Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta
- Republik Indonesia. 2006. Undang-Undang No.15 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Jakarta
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta

